

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Oleh: **Suharyono**

suharyono@polbeng.ac.id

(Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis)

Abstrak-*Pemerintah provinsi memainkan peran yang utama dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Namun, beberapa pemerintah daerah membutuhkan penilaian kinerja agar menjadi evaluasi untuk upaya yang lebih baik. Nilai penerapan e-government dari kementerian dan opini audit dari BPK yang didapat oleh pemerintah provinsi penting untuk mengukur pencapaian pemerintah provinsi. Studi ini meneliti hubungan antara e-government, opini audit dan kinerja pemerintah provinsi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup semua pemerintah provinsi di Indonesia. Menggunakan analisis regresi, diperoleh hasil bahwa e-government positif hubungannya terhadap performa pemerintah provinsi. Opini audit juga berhubungan positif dengan kinerja seperti yang diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa opini audit dari BPK dan e-government dari Kementerian dapat digunakan sebagai indikator performa pemerintah provinsi.*

Kata Kunci : *E-Government, Opini, Audit, Kinerja, Provinsi.*

Abstract-*The provincial government plays a major role in giving service to the community. However, some local governments need performance evaluations to be evaluations for better efforts. The value of implementing e-government from ministries and audit opinion from BPK obtained by the provincial government is important to measure the achievement of the provincial government. This study examines the relationship between e-government, audit opinion and provincial government performance. The population used in this study includes all provincial governments in Indonesia. Using regression analysis, the results show that e-government has a positive relationship with the performance of the provincial government. Audit opinion is also positively related to performance as expected. This proves that the audit opinion of the BPK and e-government from the Ministry can be used as an indicator of the performance of the provincial government.*

Keywords: *e-government, opinion, audit, performance, province*

PENDAHULUAN

Pemerintah provinsi (Pemda) memiliki tugas untuk melakukan tugas menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat di daerah masing-masing. Agar

tugas-tugas ini dapat dilaksanakan, administrasi pemerintah provinsi yang berkualitas tinggi diperlukan. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas-tugas ini, evaluasi kinerja pemerintah provinsi dilakukan setiap

tahun melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penentuan Peringkat dan Status Kinerja Administrasi Pemerintah provinsi. Keseluruhan skor kinerja berkisar dari 0 hingga 4. Pemerintah provinsi diharapkan memberikan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat yang ditunjukkan oleh skor kinerja tinggi. Namun, beberapa pemerintah provinsi memiliki skor kinerja yang relatif rendah.

Pemerintah provinsi mulai menerapkan e-government untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. E-government adalah kegiatan pemerintah yang relatif baru. Setiap pemerintah provinsi dinilai dan diberi peringkat berdasarkan kualitas implementasi e-government dengan skor mulai dari 1 hingga 4. Nilai yang diperoleh oleh pemerintah provinsi bervariasi. UNDESA (2014) melaporkan bahwa dalam hal layanan elektronik, Indonesia masih termasuk dalam kelompok menengah. Sebuah studi kasus oleh Dewi (2011) menemukan implementasi e-government yang sukses di sebuah desa di Provinsi Yogyakarta. Namun, ada kendala dalam sumber daya, lokasi, dan pengetahuan teknis yang dihadapi desa. Deskripsi kinerja Pemda dan kualitas e-government menimbulkan pertanyaan apakah ada hubungan antara e-government dan kinerja.

Dalam menjalankan fungsi layanan kepada masyarakat, pemerintah provinsi menyiapkan

anggaran pendapatan dan pengeluaran dan melaporkan realisasi anggaran yang merupakan bagian dari laporan keuangan. Untuk menilai kualitas laporan keuangan ini, audit atas laporan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK; Daftar istilah dan singkatan disajikan dalam Lampiran). Implementasi audit menggunakan pedoman standar audit negara (BPK, 2017). Ringkasan hasil audit semester (IHPS) dipublikasikan di situs web BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Dalam IHPS, antara lain, dilaporkan ringkasan pendapat audit atas laporan keuangan. Opini audit mencerminkan kualitas laporan keuangan. Beberapa pemerintah provinsi berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, tetapi dalam jumlah yang relatif kecil. Masih banyak pemerintah provinsi yang mendapatkan opini selain opini wajar tanpa pengecualian. Misalnya, Mir dan Sutiyono (2013) melaporkan bahwa ada peningkatan dalam laporan audit yang mendapatkan opini yang berkualitas. Deskripsi opini audit menimbulkan pertanyaan kedua, yaitu apakah ada hubungan antara opini audit dan kinerja. Hasil penelitian kualitatif oleh Hudaya dkk (2015) yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pemerintah provinsi kepada publik menunjukkan bahwa laporan yang dapat diakses oleh publik hanyalah laporan singkat, tidak selengkap

laporan untuk pemerintah pusat, dan laporan-laporan itu seringkali tidak dapat diakses oleh masyarakat secara tepat waktu. Lin dkk (2014) dalam sebuah studi tentang penggunaan laporan keuangan berkualitas di sektor swasta menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat mengurangi asimetri informasi.

Studi sebelumnya telah dilakukan di sektor swasta tentang kinerja menggunakan berbagai ukuran kinerja, seperti likuiditas atau bid-ask spread (Lin et al., 2014), akuntansi ROA dan Tobin's Q (Buallay, Hamdan, & Zureigat, 2017; Rashid, Zoysa, Lodh, & Rudkin, 2010; Zeituna & Tian, 2007), dan kinerja aftermarket jangka pendek (underpricing) dan kinerja jangka panjang (Thorsell & Isaksson, 2014). Studi tentang kinerja di sektor publik juga menggunakan ukuran kinerja yang berbeda seperti ekspektasi kinerja (James, 2011) dan pengeluaran per kapita, kinerja layanan, dan nilai uang (Andrews & Boyne, 2012).

Kinerja pemerintah provinsi / daerah diatur oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU 23/2014 disebutkan bahwa kepala daerah harus menyerahkan laporan tentang tata kelola pemerintah daerah termasuk laporan kinerja lembaga pemerintah provinsi. Laporan administrasi daerah berisi kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas bersama. Pemerintah pusat

memberikan indeks dan penilaian kinerja untuk administrasi pemerintah provinsi setiap tahun untuk bahan penilaian. Presiden menganugerahkan prestasi nasional tertinggi dalam administrasi provinsi dalam administrasi pemerintah provinsi.

UU 23/2014 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Penjelasan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Laporan Deklarasi Administrasi Pemerintah Regional kepada Komunitas. PP 3/2007 menjelaskan bahwa Laporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, yang selanjutnya disebut LPPD, adalah laporan administrasi pemerintah provinsi selama 1 (satu) tahun fiskal berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diajukan oleh kepala pemerintah daerah kepada Pemerintah.

Undang-undang 23/2014 dan PP3 / 2007 kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 (PP 6/2008) tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah. PP 6/2008 mendefinisikan pencapaian tata kelola pemerintahan provinsi sebagai pencapaian dalam pelaksanaan tata kelola provinsi yang diukur dengan input, proses, output, hasil, manfaat, dan / atau dampak. Selanjutnya, PP6 / 2008 memberikan

tinjauan umum tentang proses evaluasi kinerja, tim evaluasi, sumber informasi, dan tujuan yang berkaitan dengan kinerja administrasi pemerintah provinsi. Proses tersebut meliputi penilaian tata kelola pemerintah provinsi (selanjutnya disebut EPPD) dan penilaian kinerja administrasi pemerintah provinsi (EKPPD). EPPD adalah proses pengumpulan data sistematis dan analisis kinerja administrasi pemerintah provinsi, kemampuan untuk mengimplementasikan otonomi daerah, dan penyelesaian aspek tata kelola di wilayah yang baru terbentuk, sedangkan EKPPD adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk kinerja pemerintah daerah menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan membandingkan secara sistematis dan terus menerus kinerja administrasi pemerintah provinsi. EKPPD dirancang untuk mengevaluasi kinerja tata kelola pemerintah provinsi dalam upaya meningkatkan kinerja berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan untuk memasukkan pengukuran dan peringkat kinerja pemerintah kabupaten / kota di provinsi tersebut. Kekuatan ini terdiri dari kekuatan nasional EPPD yang merupakan kekuatan yang membantu presiden dalam melaksanakan penilaian pemerintah daerah secara nasional,

kekuatan regional EPPD yang merupakan kekuatan yang membantu kepala provinsi sebagai wakil dari pemerintah dalam menilai pemerintah kabupaten / kota di provinsi, dan kekuatan penilai yang merupakan kekuatan yang membantu gubernur, kepala daerah atau walikota dalam menilai tingkat pembuat kebijakan lokal dan menilai tingkat implementasi kebijakan daerah. Sumber utama informasi yang digunakan untuk melaksanakan EKPPD adalah LPPD. Selain sumber informasi utama, sumber informasi tambahan dapat digunakan seperti laporan pertanggungjawaban tentang pendapatan daerah dan anggaran daerah (APBD), informasi keuangan daerah, laporan kinerja lembaga pemerintah provinsi, laporan hasil pengembangan, penelitian, pengembangan, memantau, menilai, dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, melaporkan hasil tinjauan kepuasan masyarakat mengenai layanan pemerintah provinsi, dan melaporkan dan / atau informasi lain yang menunjukkan secara tepat dan jelas orang yang bertanggung jawab.

Tujuan EKPPD meliputi tingkat pembuat kebijakan lokal dan tingkat implementasi kebijakan lokal. EKPPD di tingkat kebijakan lokal mencakup beberapa aspek seperti: ketertiban umum dan perdamaian, keharmonisan dan efektivitas hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah

pusat dan antar pemerintah dalam konteks pengembangan otonomi daerah, koordinasi antara provinsi kebijakan pemerintah dan kebijakan pemerintah pusat, koordinasi antara pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD dan tindak lanjut dari proses pengambilan keputusan, efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah bersama dengan tindak lanjut pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan provinsi pada peraturan, dan aspek penilaian lainnya. EKPPD di tingkat implementasi kebijakan lokal mencakup beberapa aspek seperti kebijakan teknis untuk administrasi pemerintahan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, standar minimum pencapaian layanan, pengaturan kelembagaan regional, manajemen personalia regional, perencanaan pembangunan daerah, manajemen keuangan daerah, regional manajemen real estat, dan penyediaan fasilitas untuk partisipasi masyarakat (Mujiono, 2017).

Suharyono (2019) menggunakan definisi luas e-government sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi administrasi sehari-hari pemerintah dan definisi sempit sebagai penerapan teknologi informasi dalam memproduksi dan menyediakan layanan pemerintah.

Lebih khusus lagi, definisi e-government memiliki fitur-fitur berikut: teknologi informasi dan komunikasi paling inovatif, aplikasi internet berbasis web, warga negara dan bisnis yang mengakses informasi dan layanan pemerintah dengan lebih nyaman, meningkatkan kualitas layanan, dan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses lembaga demokratis (Fang, 2002).

Evaluasi kualitas e-government di Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi (Kemkominfo), dan hasilnya diumumkan di tingkat e-government Indonesia (PeGI). E_Gov. memiliki 3 (tiga) tujuan: (1) memberikan referensi untuk pengembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah, (2) memberikan insentif untuk meningkatkan TIK di lingkungan pemerintah melalui penilaian yang komprehensif, seimbang, dan objektif, dan (3) melihat peta keadaan penggunaan TIK di lingkungan pemerintah nasional. Strategi penerapan e-Gov adalah sebagai berikut. Pertama, peserta pemerinkatan dikelompokkan berdasarkan jenis lembaga, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, kementerian, dan lembaga non-kementerian. Kedua, penilaian menggunakan kriteria sederhana yang diuraikan untuk memudahkan

pemahaman oleh semua pihak. Ketiga, metode dan hasil dipublikasikan. Akhirnya, penilaian dilakukan secara teratur sehingga kemajuan (tren) dapat diukur.

Penilaian didasarkan pada 5 (lima) dimensi: (1) kebijakan, (2) institusi, (3) infrastruktur, (4) aplikasi, dan (5) desain. Setiap dimensi memiliki bobot yang sama karena semuanya penting, saling terkait dan mendukung. Kebijakan ini penting karena berfungsi sebagai landasan utama untuk pengembangan dan implementasi e-government. Penilaian dimensi kebijakan dibuat untuk kebijakan yang terkandung dalam dokumen hukum resmi. Dokumen-dokumen ini termasuk, antara lain, arah / tujuan, program kerja, atau pengaturan untuk pengembangan dan implementasi e-government di lembaga yang berpartisipasi. Formulir dokumen dapat berupa keputusan, peraturan, pedoman atau bentuk dokumen resmi lainnya. Alokasi dana yang memadai untuk pengembangan dan implementasi TIK yang tepat mencakup aspek yang dinilai dalam dimensi kebijakan. Dimensi kelembagaan juga penting karena terkait erat dengan keberadaan organisasi yang kredibel dan bertanggung jawab untuk pengembangan dan penggunaan TIK. Infrastruktur juga merupakan dimensi penting karena berkaitan dengan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengembangan dan

penggunaan TIK, seperti pusat data, jaringan komunikasi, perangkat keras dan perangkat lunak, saluran pengiriman layanan berbasis web, dan fasilitas pendukung.

Metodologi e-Government Indonesia mencakup menjelaskan proses kepada para peserta, mengisi kuesioner oleh para peserta, memeriksa kuesioner oleh penilai, menjelaskan dengan penilai, dan menilai dan mengevaluasi setiap peserta oleh penilai. Peringkat yang diberikan mencakup peringkat per dimensi dari setiap peserta dan rata-rata dari semua peserta. Dari hasil penyusunan nasional berikutnya, normalisasi kemudian dilakukan. Pengambilan keputusan akhir akan ditentukan melalui evaluasi penilai. Hasil peringkat akan dipublikasikan melalui berbagai media, situs web, dan seminar sehingga hasilnya akan tersedia untuk umum. Peringkat peserta untuk setiap dimensi dan keseluruhan adalah sebagai berikut: (1) $3,60 \geq$ sangat baik $\leq 4,00$, (2) $2,60 \geq$ baik $< 3,60$, (3) $1,60 \geq$ adil $< 2,60$, (4) $1,00 \geq$ buruk $< 1,60$.

Dalam penelitian ini, pencapaian adalah pencapaian pemerintahan provinsi yang didefinisikan sebagai pencapaian pemerintahan provinsi yang diukur dengan input, proses, output, hasil, manfaat, dan / atau dampak (PP 6/2008). Skor kinerja yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri digunakan sebagai ukuran kinerja. E-Government (e-Gov)

adalah peringkat e-government yang diharapkan dapat lebih memotivasi semua lembaga pemerintah dalam meningkatkan penggunaan TIK dalam melayani masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah.

Studi sebelumnya telah menunjukkan hubungan antara e-government dan kinerja (S. Bhatnagar, 2003; S. C. Bhatnagar & Singh, 2010; Davies, 2015; UNDESA, 2014). Layanan berbasis komputer lebih disukai karena perjalanan ke layanan yang lebih sedikit, waktu tunggu untuk menerima layanan yang lebih pendek, dan pengurangan korupsi (S. C. Bhatnagar & Singh, 2010). Studi lain menyatakan bahwa komunikasi dan teknologi informasi (TIK) berfungsi sebagai alat untuk pemrosesan data yang lebih cepat dan lebih efisien dalam administrasi publik, khususnya dalam lingkup pengiriman layanan publik, layanan publik yang secara efisien menghasilkan penghematan biaya, atau mengembangkan jenis layanan baru untuk hal yang sama. biaya (Davies, 2015). Selain itu, e-government meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, meningkatkan pemberian layanan yang efektif, dan memberdayakan masyarakat pedesaan (dampak sosial). E-government juga mengurangi biaya dalam pemberian layanan, mengendalikan pengeluaran pemerintah, meningkatkan pendapatan pajak (S. Bhatnagar,

2003). Rokhman (2011) melakukan studi survei di Indonesia pada faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas pemanfaatan e-government dan menemukan bahwa di antara faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas pemanfaatan e-government adalah keunggulan dan kompatibilitas relatif.

Penurunan kinerja pemerintah daerah dapat menunjukan kemungkinan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, akibat menurunnya perhatian pemerintah dalam menjalankan program kerja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya kinerja pemerintah, salah satunya faktor internal masing-masing pemerintah provinsi itu sendiri. Lestiawan (2015) menyatakan bahwa kinerja sebuah pemerintah daerah akan lebih baik bila prinsip-prinsip good government governance diterapkan pada pemerintah daerah. Selain itu juga mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip good government governance akan menjamin terciptanya pertumbuhan ekonomis. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting dan dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu respon terhadap good government governance ini sangat tinggi dan pegawai pemerintah pun cukup concern mengenai hal ini.

Menurut Scholl (2002), meskipun teori pemangku

kepentingan biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan sektor swasta, teori pemangku kepentingan juga dapat diterapkan pada organisasi sektor publik. Lebih khusus lagi, teori pemangku kepentingan dapat digunakan dalam menjelaskan aplikasi e-government oleh pemerintah. Ini disebabkan oleh sifat yang tumbuh yang membutuhkan jaringan organisasi sektor publik. Menurut teori pemangku kepentingan yang diterapkan di sektor swasta, perusahaan akan lebih sukses jika perusahaan mampu mempertahankan kepuasan pemangku kepentingan daripada jika perusahaan hanya mampu memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Karakteristik e-government sebagaimana diidentifikasi dalam definisi e-government oleh Fang (2002) memungkinkan organisasi sektor publik, seperti pemerintah provinsi, untuk memberikan kepuasan yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan bahwa e-government memiliki hubungan dengan kinerja. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1. E-Government secara positif terkait dengan Kinerja Pemerintah provinsi

Pendapat audit atas laporan keuangan pemerintah provinsi disediakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan,

BPK telah menetapkan standar audit pertama pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintah (SAP). Seiring dengan amandemen Konstitusi, undang-undang, dan peraturan di bidang pemeriksaan, pada 2007 BPK menyiapkan standar audit dengan nama Standar Audit Negara (SPKN). Pada awal 2017 BPK berhasil menyelesaikan penyempurnaan SPKN 2007 yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan BPK No. 1 tahun 2017. Sejak berlakunya Peraturan BPK ini, SPKN mengikat BPK serta pihak lain yang melakukan audit dan yang memiliki tanggung jawab manajemen keuangan negara. Steccolini (2004) mempertanyakan apakah laporan tahunan dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban bagi pemerintah provinsi, dan menemukan bahwa laporan tahunan pemerintah provinsi tidak memainkan peran penting sebagai media komunikasi dengan pengguna eksternal. Selain itu, cara akuntabilitas lain untuk kinerja kepada pemangku kepentingan tidak digunakan oleh sebagian besar pemerintah provinsi. Namun, (Ferraz & Finan, 2011) menyarankan kegunaan dari laporan audit, yaitu dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk meninjau dampak pertanggungjawaban pemilu terhadap praktik korupsi politisi yang berkuasa.

Menurut teori institusional, perlunya organisasi untuk menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi harapan lingkungan kelembagaan akan berdampak pada organisasi dalam memilih mekanisme kontrol dan koordinasi (Gupta, Dirsmith, & Fogarty, 1994). Teori institusional juga digunakan oleh Carpenter dan Feroz (2001) untuk menjelaskan bagaimana lingkungan institusional memengaruhi keputusan keempat negara bagian di Amerika Serikat dalam membuat keputusan tentang pemilihan mekanisme pelaporan keuangan, terutama dalam penggunaan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Pemerintah provinsi di Indonesia perlu menunjukkan bahwa mereka telah mengimplementasikan programnya sebaik mungkin. Implementasi program-program ini tercermin dalam laporan keuangan, terutama dalam laporan realisasi anggaran yang harus diaudit oleh BPK. Laporan keuangan yang berisi perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran, pengendalian internal, dan audit eksternal atas laporan keuangan penting bagi pemerintah provinsi (Chan, 2003). Dalam melakukan audit, BPK memberikan pendapat atas laporan keuangan pemerintah provinsi. Pendapat auditor diberikan berdasarkan hasil audit dari laporan keuangan dan menunjukkan kualitas laporan keuangan berdasarkan

efektivitas pengendalian internal, pengungkapan yang memadai atas laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah Indonesia (IGAS), dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah (BPK, 2017). Kinerja pemerintah provinsi dapat dievaluasi tidak hanya pada kualitas pelaporan keuangan tetapi juga dapat dievaluasi secara luas dari kinerja administrasi pemerintah provinsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dengan opini audit yang lebih baik diharapkan juga memiliki kinerja administrasi pemerintah provinsi yang lebih tinggi. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2: Opini audit berhubungan positif dengan kinerja pemerintah provinsi.

METODE PENELITIAN

Model regresi atas hipotesis adalah sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = \alpha + \beta_1 \text{E-Government} + \beta_2 \text{Opinie}$$

Kinerja adalah skor peringkat kinerja pemerintah provinsi.

E-government adalah skor yang ditetapkan dalam peringkat e-government Indonesia. Kebijakan, Institusi, Infrastruktur, Aplikasi, Perencanaan adalah dimensi dari e_Gov. Opini adalah opini auditor untuk laporan keuangan pemerintah provinsi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencapaian pemerintah provinsi di Indonesia

yang didefinisikan sebagai pencapaian langkah-langkah tata kelola provinsi yang diukur dengan input, proses, output, hasil, manfaat dan / atau dampak. Variabel kinerja pemerintah provinsi diukur oleh skor penilaian kinerja pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah opini audit. Pendapat auditor adalah pendapat yang diberikan oleh auditor dari Badan Tertinggi (CPC) yang mengaudit laporan keuangan pemerintah provinsi. Jenis pendapat (dan nilai yang dipegang oleh masing-masing jenis dalam tanda kurung) termasuk yang tidak memenuhi syarat (1), yang tidak memenuhi syarat dengan penjelasan ayat (2), pendapat wajar (3), pendapat buruk (4), dan tak memberikan pendapat (5).

Data sekunder menjadi pilihan dalam penelitian ini untuk mewakili variabel dependen dan independen. Data kinerja pemerintah provinsi (variabel dependen), dikumpulkan melalui keputusan Mendagri tentang status dan pencapaian kinerja administrasi pemerintah provinsi secara nasional. Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai sumber pengumpulan data adalah putusan Mendagri 100-53 tahun 2018 untuk data pencapaian pemerintah provinsi. Data opini audit (variabel independen) berasal dari ringkasan hasil audit semester (IHPS) yang

dapat diakses dari situs web Badan Pemeriksa Keuangan (<http://www.bpk.go.id/ihaps>).

Populasi yang akan diteliti dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data kinerja pemerintah provinsi dan opini audit. Sumber populasi yang digunakan adalah Kepmendagri tentang penentuan peringkat dan status kinerja administrasi pemerintah provinsi seperti yang disebutkan di bagian metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan Kepmendagri sebagai kerangka yang berisi populasi atau seluruh kinerja administrasi pemerintah provinsi. Adapun jumlah pemerintah provinsi yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 33 provinsi..

HASIL DAN PEMBAHASAN Deskriptif

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif.

Tabel 1. E-gov dan Opini Audit

No	Nama Pemerintah provinsi	Skor	Peringkat	Status	Opini
1	Jawa Timur	3.3263	1	1	1
2	Jawa Barat	3.2496	2	1	1
3	Jawa Tengah	3.1241	3	1	1
4	DKI Jakarta	3.1041	4	1	1
5	SulSel	3.1039	1	1	1
6	Sumatera Barat	3.0781	6	1	1
7	KalTim	3.0702	7	1	1
8	KepRi	3.0329	8	1	1
9	DI Yogyakarta	3.0012	9	1	1
10	NTB	2.9712	10	2	1
11	Gorontalo	2.9663	11	2	1
12	Lampung	2.9261	12	2	1
13	Banten	2.8619	13	2	1
14	KalSel	2.8100	14	2	1
11	Bali	2.8381	11	2	1
16	Jambi	2.8404	16	2	1
17	SumSel	2.8200	17	2	1
18	BaBel	2.8269	18	2	1
19	Maluku	2.7830	19	2	1
20	KalBar	2.7103	20	2	1
21	SulTra	2.7472	21	2	1
22	Aceh	2.7396	22	2	1
23	SulTeng	2.7291	23	2	1
24	Riau	2.6994	24	2	1
21	Sumatera Utara	2.6404	21	2	1
26	Sulawesi Barat	2.6043	26	2	1
27	Sulawesi Utara	2.1830	27	2	1
28	Maluku Utara	2.1481	28	2	2
29	Papua Barat	2.1371	29	2	1
30	KalTeng	2.1048	30	2	1
31	NTT	2.4772	31	2	1
32	Bengkulu	2.4444	32	2	1
33	Papua	2.3086	33	2	1
	Minimum	2.3086			1
	Maksimum	3.3263			2
	Mean	2.8211			1
	Std. Deviation	0.2444			

Keterangan:

Status : 1 = Sangat Tinggi dan 2 = Tinggi

Opini Audit : 1 = WTP dan 2 = WDP

Pengujian Hipotesis

Hasil untuk menguji hipotesis antara pengaruh e-government dan audit opini terhadap kinerja pemerintah provinsi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

<i>Variables</i>	<i>Coef.</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
<i>Constant</i>	3.111	12.055	0.000
<i>e-Gov</i>	0,200	4.982	0.000
<i>Audit Opinion</i>	0.096	3.139	0.001
F		10.298	0.000

Sumber: Diolah Dari Hasil Penelitian

Hasilnya menunjukkan bahwa e-government memiliki koefisien positif dan signifikan pada level 0,00 menyatakan bahwa (1) Kebijakan, (2) Institusi, (3) Infrastruktur, (4) Aplikasi, dan (5) Perencanaan dimensi e-government berhubungan positif dengan kinerja pemerintah daerah. Hasil ini konsisten dengan hasil hipotesis 1. Selain itu, koefisien opini audit adalah positif dan signifikan (sig. <0,01). Hasil ini mendukung hipotesis bahwa audit opinion memiliki hubungan positif dengan kinerja pemerintah provinsi. Pendapat audit yang buruk adalah risiko bagi suatu entitas (Rosman, Shafie, Sanusi, Johari, & Omar, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil audit yang buruk cenderung menunjukkan kinerja pemerintah provinsi yang buruk. Informasi keuangan pemerintah provinsi untuk masyarakat cenderung terlambat atau tidak lengkap (Hudaya et al., 2011).

Selain itu, transparansi memudahkan orang luar untuk menganalisis tindakan dan kinerja organisasi (Maclean, 2014). Laporan keuangan harus diaudit, dan pendapat auditor dapat digunakan sebagai indikator kinerja administrasi pemerintah provinsi.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang hubungan positif antara opini audit dan e-government terhadap kinerja pemerintah provinsi. Temuan penelitian ini juga mendukung hipotesis bahwa opini auditor dan e-government memiliki hubungan positif dengan kinerja administrasi pemerintah provinsi. Dengan demikian, pemerintah provinsi dengan peringkat e-government dan opini audit yang lebih baik cenderung memiliki kinerja yang lebih tinggi.

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan data kinerja yang tersedia hanya pada tahun 2018, sedangkan data kinerja pemerintah provinsi tahun 2019 belum dipublikasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke pemerintah provinsi kabupaten dan kota yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Andrews, Rhys; & Boyne, George. (2012). Structural Change and Public Service Performance:

- The Impact of the Reorganization Process in English Local Government. *Public Administration* 90(2), 297-312.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01916.x>
- Bhatnagar, S. (2003). The Economic And Social Impact Of E-Government. *A Background Technical Paper for the Proposed UNDESA Publication, E-Government, the Citizen and the State: Debating Governance in the Information Age.* <http://www.iimah.d.ernet.in/~subhash/pdfs/UNDESAeGovReport.pdf>.
- Bhatnagar, Subhash C.; & Singh, Nupur. (2010). Assessing the Impact of E-Government: A Study of Projects in India, *Information Technologies & International Development*, 6(2), 2010, 109-127.
- BPK, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara [Regulation of the Audit Board of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2017. State Auditing Standards]. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2017
- Buallay, Amina; Hamdan, Allam; & Zureigat, Qasim. (2017). Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Saudi Arabia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*. 11(1), 78-98. doi: 10.14413/aabfj.v11i1.6
- <https://doi.org/10.14413/aabfj.v11i1.6>
- Carpenter, V. L., & Feroz, E. H. (2001). Institutional theory and accounting rule choice: an analysis of four US state governments' decisions to adopt generally accepted accounting principles. *Accounting, organizations and society*, 26(7-8), 565-596.
- Chan, J. L. (2003). Government accounting: an assessment of theory, purposes and standards. *Public Money & Management*, 23(1), 13-20.
- Davies, Ron. (2011) E-Government: Using Technology to Improve Public Services and Democratic Participation, *European Parliamentary Research Service*.
- Dewi, A. S. (2011). The role of local e-government in bureaucratic reform in terong, Bantul District, Yogyakarta Province, Indonesia. *Internetworking Indonesia Journal*, 3(2), 49-56.
- Fang, Z. (2002). E-government in digital era: concept, practice, and development. *International journal of the Computer, the Internet and management*, 10(2), 1-22..
- Ferraz, C., & Finan, F. (2011). Electoral accountability and corruption: Evidence from the audits of local governments. *American Economic Review*, 101(4), 1274-1311.
- Gupta, Parveen P.; Dirsmith, Mark W.; & Fogarty, Timothy J. (1994). Coordination and Control in A Government

- Agency: Contingency and Institutional Theory Perspectives on GAO Audits. *Administrative Science Quarterly*, 39(2), 264. <https://doi.org/10.2307/2393236>
- Hudaya, M., Smark, C., Watts, T., & Silaen, P. (2015). The use of accountability reports and the accountability forum: Evidence from an Indonesian local government. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 9(4), 57-70.
- James, O. (2011). Managing Citizens' expectations Of Public Service Performance: Evidence From Observation And Experimentation In Local Government. *Public Administration*, 89(4), 1419-1435.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Nomor 100 - 53 Tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
- Lestiawan, H. Y., & Jatmiko, B. (2015). Key Success Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). *Maksimum*, 5(1)
- Lin, Z., Jiang, Y., Tang, Q., & He, X. (2014). Does high-quality financial reporting mitigate the negative impact of global financial crises on firm performance? Evidence from the United Kingdom. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 8(5), 19-46.
- Maclean, S. (2014). Examining auditing as an essential element of financial management and good governance in local government. *Africa's Public Service Delivery & Performance Review*, 2(2), 82-101.
- Mir, M., & Sutiyono, W. (2013). Public sector financial management reform: A case study of local government agencies in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 7(4), 97-117.
- Mujiono, M., & Suharyono, S. (2017). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tax Amnesty. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 5(2), 158-166.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
- Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 (PP 6/2008) tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Rashid, A., De Zoysa, A., Lodh, S., & Rudkin, K. (2010). Board composition and firm performance: Evidence from Bangladesh. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 8(5), 19-46.

- Finance Journal*, 4(1), 76-95.
- Rokhman, A. (2011). e-Government adoption in developing countries; the case of Indonesia. *Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences*, 2(5), 228-236..
- Rosman, R. I., Shafie, N. A., Sanusi, Z. M., Johari, R. J., & Omar, N. (2016). The Effect of Internal Control Systems and Budgetary Participation on the Performance Effectiveness of Non-profit Organizations: Evidence from Malaysia. *International Journal of Economics and Management*, 10, 523-539..
- Suharyono, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(1), 42-47.
- Scholl, H. J. (2001). Applying stakeholder theory to e-government. In *Towards the E-society* (pp. 735-747). Springer, Boston, MA..
- Suharyono, S. The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (Bumd) Of Riau Province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236-249.
- Steccolini, I. (2004). Is the annual report an accountability medium? An empirical investigation into Italian local governments. *Financial Accountability & Management*, 20(3), 327-350.
- Suharyono, S., & Mule, Y. A. (2019). Comparative Analysis of Students Learning Achievement in The Advanced Public Sector Accounting. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 4(2).
- Thorsell, A., & Isaksson, A. (2014). Director experience and the performance of IPOs: Evidence from Sweden. *Thorsell, A., Isaksson, A., (2014). Director Experience and the Performance of IPOs: Evidence from Sweden. Australasian Accounting Business & Finance Journal*, 8(1), 3-24.
- UNDESA, *United Nations E-Government Survey 2014 - E-Government for the Future We Want*, New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) - The Division of Public Administration and Development Management (DPADM), 2014.
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Zeitun, R., & Tian, G. G. (2014). Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan. *Australasian Accounting Business & Finance Journal*, Forthcoming.